



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL

Asrofi Langgeng Noerman Syah¹, Bahri Kamal², Mella Katrina Sari³

Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal
Email: asrofilanggeng@gmail.com¹, bahrikamal17@gmail.com²,
mellakatrina92@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak Kantor UPPD Kabupaten Tegal pada khususnya dan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor jenis roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang terdaftar di UPPD Kabupaten Tegal yang berjumlah 100 orang dengan metode pengambilan sampel adalah random sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Sedangkan sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

Kata Kunci: Pengetahuan pajak, Pelayanan pajak, Sanksi pajak, Tingkat pendidikan, Tingkat penghasilan, Kepatuhan wajib pajak

Abstract

This study aims to provide input to the Tegal Regency UPPD Offices in particular and in Central Java Province in general in order to increase Motor Vehicle Tax revenues so as to increase Regional Original Revenue. Specifically this study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying Motor Vehicle

Taxes in Tegal Regency. Data collection methods in this study are questionnaires, observations, interviews and literature studies. The sample used was a 2 (two) & 3 (three) wheeled type motor vehicle taxpayer registered in the Tegal Regency UPPD which numbered 100 people with random sampling. Data analysis method used is multiple linear regression test using SPSS version 22. The results show that tax knowledge, tax service and education level have a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in Tegal Regency. While tax sanctions and income levels have no significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Tegal Regency.

Keywords: tax knowledge, tax service, tax penalties, level of education, level of income, taxpayer's compliance

A. PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah provinsi yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. Potensi tersebut didukung dengan adanya daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah provinsi seharusnya berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 menyebutkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan ketepatan dalam pembayaran bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena

itu, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik dari petugas dan sistem pembayaran pajak yang mudah dijangkau dapat membuat wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Sanksi pajak harus diberikan bagi para pelanggar pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam membayar pajak. Semakin besar tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka akan menyebabkan kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah provinsi Jawa Tengah dibawah naungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama 3 (tiga) instansi terkait yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Asuransi Jasa Raharja Jawa Tengah. Kantor

SAMSAT memiliki perwakilan di tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang disebut UPPD (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah).

Kantor UPPD Kabupaten Tegal merupakan perwakilan kantor SAMSAT yang mencakup wilayah kerja di Kabupaten Tegal. Kantor UPPD Kabupaten Tegal sebagai tempat bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) merupakan salah satu bentuk kemudahan pelayanan yang disediakan oleh kantor UPPD Kabupaten Tegal. Layanan tersebut memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mengantri di loket pembayaran. Selain itu, Kantor UPPD Kabupaten Tegal juga membuka layanan SAMSAT SIAGA ke beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal yang terjadwal setiap minggunya. Pemberian pelayanan yang baik dan mendekatkan pembayaran pajak ke masyarakat diharapkan dapat memicu motivasi dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pihak UPPD Kabupaten Tegal telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi masih terdapat masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih cukup tinggi di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di UPPD Kabupaten Tegal diketahui bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) untuk kepemilikan pribadi periode 1 Januari – 30 April 2018 sebesar 56.746 unit, dengan pokok tunggakan sejumlah Rp. 7.462.705.100,-. Sedangkan jumlah tunggakan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, station wagon kepemilikan pribadi sejumlah 1.384 unit

dengan pokok tunggakan sebesar Rp. 1.822.572.438,-. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal masih sangat rendah padahal jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Carolina, 2009 dalam Ilhamsyah, Endang dan Dewantara, 2016). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Angkoso, 2010 dalam Kemala, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_1 = Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

2. Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pelayanan pajak menurut Boediono (2003) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Caroko, 2015 dalam Kusuma, 2016). Sedangkan pelayanan fiskus adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mareta, 2014 dalam Kusuma, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_2 = Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan

hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturannya (dalam Aprilliyana, 2017). Sanksi pajak yang dikenakan atas keterlambatan membayar pajak dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak menyadari bahwa pemberian sanksi pajak dapat merugikan dirinya sendiri. Sanksi pajak diharapkan sebagai pencegah ketidakpatuhan dalam membayar pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_3 = sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

4. Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan wajib pajak berkaitan dengan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh wajib pajak dan pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh wajib pajak. Tingkat pendidikan berhubungan dengan pemahaman wajib pajak terkait peraturan pajak yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak juga menjadi lebih dipahami sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik atau kepatuhan dalam membayar pajak dapat dilaksanakan tepat waktu. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang semakin rendah maka wajib pajak akan enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya memahami terkait peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_4 = Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

5. Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya (Rustiyaningsih, 2011 dalam Kusuma, 2016). Semakin besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak karena uang yang sudah tersedia dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki penghasilan masih rendah akan enggan untuk membayar pajak karena tidak adanya uang untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_5 = tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak,

tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Metode pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang di gunakan adalah kuesioner (angket).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor jenis roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang terdaftar di UPPD Kabupaten Tegal sejumlah 369.909 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin. Dengan populasi (N) sebesar 369.909 wajib pajak dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, maka besarnya sampel adalah:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{369.909}{1+369.909(0,1)^2} \\ &= \frac{369.909}{3.700,09} \\ &= 99,97 = 100 \text{ sampel}\end{aligned}$$

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu teknik sampling yang anggota sampelnya dipilih secara acak sejumlah 100 sampel. Instrumen penelitian ini diukur menggunakan model Skala Likert 5 poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 24 pertanyaan. Sebelum di analisis maka kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas agar kuesioner tersebut dikatakan valid.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi

22. Persamaan regresi linier berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh adalah kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak kendaraan bermotor jenis roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) yang terdaftar di Kantor UPPD/SAMSAT Kabupaten Tegal.

Hasil uji validitas untuk masing – masing pertanyaan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	Pearson Correlation	Signifikan
Pengetahuan Pajak		
1	0,552	0,000
2	0,504	0,000
3	0,555	0,000
4	0,532	0,000
5	0,661	0,000
Pelayanan Pajak		
1	0,595	0,000
2	0,777	0,000
3	0,589	0,000
4	0,598	0,000
5	0,613	0,000
Sanksi Pajak		
1	0,628	0,000
2	0,626	0,000
3	0,598	0,000
4	0,591	0,000
Tingkat Pendidikan		
1	0,440	0,000
2	0,729	0,000
3	0,671	0,000
Tingkat Penghasilan		
1	0,434	0,000
2	0,857	0,000
3	0,839	0,000
Kepatuhan Wajib Pajak		
1	0,744	0,000
2	0,684	0,000
3	0,602	0,000
4	0,619	0,000

Sumber : Data primer diolah (2018)

Berdasarkan hasil Uji Validitas pada tabel 1 diatas diketahui bahwa semua variabel penelitian ini menunjukkan besarnya nilai Sig. (2-tailed) dari semua butir pertanyaan variabel adalah $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut valid.

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Pajak	0,832
Pelayanan Pajak	0,692
Sanksi Pajak	0,866
Tingkat Pendidikan	0,741
Tingkat Penghasilan	0,795
Kepatuhan Wajib Pajak	0,808

Sumber : Data primer diolah (2018)

Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa semua variabel penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha adalah $> 0,60$ sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut reliabel.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97442031
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,049
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

Sumber : Data Primer diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3 diatas menggunakan analisis statistik dengan Uji *Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil $0,200 > 0,05$ sehingga dikatakan data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Pajak	,944	1,059
Pelayanan Pajak	,942	1,061
Sanksi Pajak	,554	1,806
Tingkat Pendidikan	,519	1,926
Tingkat Penghasilan	,981	1,019

Sumber : Data Primer diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	,457
Pengetahuan Pajak	,510
Pelayanan Pajak	,870
Sanksi Pajak	,211
Tingkat Pendidikan	,309
Tingkat Penghasilan	,303

Sumber : Data primer diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 5 dengan uji glejser menunjukkan nilai Sig. variabel independen dalam penelitian ini $> 0,05$ yang berarti model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 6 berikut ini. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sanksi pajak dan tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi yang $>0,05$ sehingga variabel sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.530	.114		22.188	,000
Pengetahuan_pajak	-.010	,005	-.321	-2.091	,039
Pelayanan pajak	,022	,005	,643	4.085	,000
Sanksi pajak	,001	,020	,007	.074	,941
Tingkat Pendidikan	,011	,004	,232	2.392	,019
Tingkat Penghasilan	-.012	,020	-.058	-.607	,545

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 7 berikut ini. Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi yang $< 0,05$ (5%) Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.332	5	,066	4.687	,001 ^b
Residual	1.330	94	,014		
Total	1.661	99			

Sumber : Data primer diolah (2018).

Hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,039 yang berarti $<0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa H_1 diterima. Hal ini berarti pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di Kabupaten Tegal sangat baik sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak mendapat pengetahuan pajak melalui pendidikan formal maupun non formal yang pernah diikuti atau didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Pengetahuan pajak yang semakin banyak dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis variabel pelayanan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor menganggap pelayanan pajak di Kantor UPPD Kabupaten Tegal sudah baik. Hal ini

dapat ditunjukkan dengan adanya standar pelayanan yang ditentukan, pelayanan yang cepat, bebas antri dan tanpa calo pada Kantor UPPD Kabupaten Tegal sehingga mendukung proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu pada Kantor UPPD Kabupaten Tegal telah memberikan pelayanan SAMSAT SIAGA dengan mobil keliling di setiap kecamatan dan adanya sistem pembayaran pajak online dengan aplikasi SAKPOLE. Hal ini berarti semakin baik pelayanan pajak yang diberikan maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif dan lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,941 yang berarti $> 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa H_3 ditolak. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap sanksi pajak yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan masih tergolong ringan sehingga wajib pajak menjadi tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti wajib pajak akan tetap membayar pajak kendaraan bermotor meskipun mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak karena sanksi yang diberikan terlalu kecil.

Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti $< 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa H_4 diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan pajak yang dimilikinya dan lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian hipotesis variabel tingkat penghasilan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,545 yang berarti $> 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa H_5 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat penghasilan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi, belum tentu membayar pajak secara tepat waktu. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tidak besar justru dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu karena adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak maka belum tentu menjamin wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

- b. Variabel sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor UPPD Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya berupa sanksi administratif berupa denda sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
- b. Pihak Kantor UPPD Kabupaten Tegal hendaknya terus melakukan inovasi dan program kerja yang menarik wajib pajak agar mau membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
- c. Pihak Kantor UPPD Kabupaten Tegal diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan yang maksimal dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor
- d. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pajak agar memiliki kesadaran diri untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

Aprilliyana, Putri. 2017. *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Danarsi, Nurlaela Dan Subroto. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak Volume 18 No. 01 Juli 2017

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Halim, Bawono Dan Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta

Ilhamsyah, Endang Dan Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 8 No. 1 2016 Universitas Brawijaya

Ismail, Tri Julianti Fatimah. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar*. Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

Kemala, Winda. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Online Mahasiswa Volume 2 No. 1 Februari 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK-04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Kusuma, Kartika Candra. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit ANDI. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Putra, I Made Adi Darma Dan I Ketut Jati. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 18.1 Januari 2017

Putri, Amanda R. Siswanto Dan I Ketut Jati. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung

Syah, Asrofi Langgeng Noerman Dan Krisdiyawati. 2017. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes)*. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi (AKSI) Volume 2 Edisi 1 September 2017 Politeknik Negeri Madiun

Ummah, Muslikhatun. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap*

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang.
Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sari, R.A Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013.*Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi
(UPPP) Kabupaten Seluma* Jurnal Ekombis Review. Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu